

Strategi Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M)

Sultan Abdul Hamid II's Pan-Islamic Political Strategy (1876-1909 AD)

Afifah Alawiyah¹, Muhammad Faiz^{2*}, Muhammad Masruri³

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jalan Mataram No.1, Mangli, Kec. Kaliwates, Jember, 58138, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jalan Mataram No.1, Mangli, Kec. Kaliwates, Jember, 58138, Indonesia

³ Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit raja, 86400, Batu Pahat, Johor, Malaysia

*Corresponding Author: faiz_spi@uinkhas.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30880/ahcs.2024.05.02.017>

Maklumat Artikel

Diserah: 20 April 2024

Diterima: 30 Mei 2024

Diterbitkan: 30 Jun 2024

Kata Kunci

Dasar politik, Pan-Islamisme, Sultan Abdul Hamid II

Abstract

Sultan Abdul Hamid II dilantik menjadi Khalifah Negara Uthmaniyyah pada 31 Ogos 1876 Masihi. Zaman kepimpinan sultan-sultan sebelum Abdul Hamid II berkuasa lebih cenderung kepada Barat menyebabkan Negara Uthmaniyyah mengalami pelbagai masalah terutamanya pembaratan dan sekularisasi yang memberi kesan kepada dinamik politik, sosial dan agama. Sultan Abdul Hamid II membawa pendekatan tersendiri terhadap kepimpinan baginda dengan tujuan memulihkan kestabilan Negara Uthmaniyyah dan mengukuhkan umat Islam dengan dasar politik Pan-Islamisme. Visi Pan-Islamisme ini sebagai satu cara untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia, sejajar dengan strateginya yang lebih luas untuk menstabilkan Dinasti Uthmaniyyah semasa tempoh cabaran yang ketara. Kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif dengan memfokuskan kepada analisis kritikal yang berkaitan dengan sejarah Empayar Uthmaniyyah, menggabungkan teknik penyelidikan perpustakaan, yang melibatkan pengumpulan rujukan daripada buku, jurnal, artikel, tesis, dan literatur lain yang berkaitan dengan sejarah Uthmaniyyah Turkiye. Dasar Pan-Islamisme. Hasil kajian ini merumuskan bahawa strategi yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II dalam merealisasikan dasar politik Pan-Islamisme baginda termasuklah: a.) Strategi propaganda media massa, b.) Penghantaran konsular ke pelbagai wilayah Islam, c.) Pembangunan sistem pengangkutan, d.) Kempen untuk memajukan pendidikan, dan e.) Strategi untuk memajukan ekonomi.

Keywords

Political policy, Pan-Islamisme, Sultan Abdul Hamid II

Abstract

Sultan Abdul Hamid II was appointed Caliph of the Ottoman State on August 31, 1876 AD. The period of leadership of the sultans before Abdul Hamid II came to power was more inclined towards the West, causing the

Ottoman State to experience various problems, especially westernization and secularization which had an impact on political, social and religious dynamics. Sultan Abdul Hamid II brought his own approach to his leadership with the aim of restoring stability to the Ottoman State and strengthening Muslims with the political policy of Pan-Islamisme. This vision of Pan-Islamisme as a means to unite Muslims around the world, aligned with his broader strategy to stabilize Ottoman Dynasty during a period of significant challenge. This study uses qualitative research methods with a focus on critical analysis related to the history of the Ottoman Empire, combining library research techniques, which involves collecting references from books, journals, articles, theses, and other relevant literature related to the history of Ottoman Turkiye's Pan-Islamisme policy. The results of this study conclude that the strategies carried out by Sultan Abdul Hamid II in realizing his political policy of Pan-Islamisme include: a.) Mass media propaganda strategy, b.) Consular dispatches to various Muslim regions, c.) Development of a transportation system, d.) Campaign to advance education, and e.) Strategy to advance the economy.

1. Pendahuluan

Dalam berbagai catatan sejarah, diketahui bahwa asal usul Kesultanan Utsmaniyah dimulai sebelum tahun 1300 Masehi (Masudul, 1995). Entitas tangguh ini pertama kali muncul di bawah kepemimpinan Osman Gazi bin Ertugrul, seorang tokoh terkemuka di wilayah Turki kurun pertengahan. Osman dan pasukannya meraih kemenangan penting melawan 2.000 tentara Kristen Bizantium, kemudian menguasai kota Nicea (Izmir) pada tahun 1302 M. Momen penting ini menjadi tonggak berdirinya Dinasti Utsmaniyah yang kemudian dipimpin oleh para keturunan Osman Ghazi (Halil, 1995). Luas wilayah Kesultanan Utsmaniyah cukup luas, meliputi Semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara (Dedi, 2016).

Dalam konteks yurisprudensi Islam, khilafah mewakili entitas politik yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan Islam berfungsi sebagai kerangka dasar negara. Misi kekhalifahan melibatkan penyebaran Islam secara global melalui dakwah dan jihad (perjuangan) (al-Nabhani, 2002). Menurut teks fundamental dalam mazhab Syafi'i, seperti dalam kitab *Fath al-Qarib*, jihad dianggap sebagai kewajiban komunal yang dilakukan setiap tahun.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negara-negara Islam, sejak zaman Nabi Muhammad hingga Kesultanan Utsmaniyah, menganjurkan ekspansi militer ke *Dar al-harb* (wilayah non-Muslim) hingga masuk Islam atau tunduk pada Khilafah, disertai dengan pembayaran sejumlah pajak atau *jizyah* bagi non-Muslim. Seperti pada masa Sultan Salim I yang berhasil menaklukkan Mamluk di Mesir dan mewarisi jabatan khalifah dari Daulah Abbasiyah pada tahun 1517 M, ia juga mendapatkan kewenangan untuk menjadi Pelayan Dua Tanah Suci.

Jadi, selain berhak untuk mengontrol Mekkah dan Madinah sebagai ritus umat Islam sedunia untuk melaksanakan ibadah haji, Daulah Utsmaniyah juga berkewajiban untuk mengamankan rute-rute menuju Tanah Suci, khususnya rute Laut Merah dan Samudera Hindia. Hal ini membuat khalifah harus berhadapan dengan armada laut Portugis yang saat itu mencoba merebut kontrol perdagangan internasional di perairan Samudera Hindia (Andrew, 2015).

Konsep khilafah, yang dihormati oleh para ulama sebagai institusi yang menjaga agama dan mengawasi urusan global, mengalami pengikisan bertahap pada otoritasnya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I (1823-1861 M). Sultan Abdul Majid I, penguasa Daulah Utsmaniyah, memprakarsai sebuah gerakan resmi menuju westernisasi dalam pemerintahan, menjadi ujung tombak penerapan sistem Tanzimat (Reformasi). Hal ini menandai era penting di mana kekhalifahan Utsmaniyah mengadopsi banyak undang-undang yang dipengaruhi oleh model-model Barat (Muhammad Nicho, 2020).

Di bawah dasar Tanzimat, kekhalifahan Utsmaniyah melakukan serangkaian reformasi yang mencerminkan prinsip dan praktik seperti Barat. Sultan Abdul Majid I menganjurkan integrasi Negara Utsmaniyah ke dalam lingkup Eropah, mencari penerimaan dalam komunitas Eropah. Namun penerimaan ini datang dengan ketentuan yang ketat. Kesultanan Utsmaniyah diharuskan melepaskan Islam sebagai landasan hubungan internasionalnya dan mematuhi prinsip-prinsip "Hukum Publik Eropah".

Era Tanzimat menandai perubahan signifikan dalam dasar luar negeri Utsmaniyah, khususnya mengenai ekspansi militer dan pertahanan melawan dinasti Muslim lainnya yang berjanji setia kepada Istanbul. Kekuasaan Utsmaniyah dibatasi kemampuannya untuk terlibat dalam inisiatif dasar luar negeri aktif, termasuk intervensi militer, kerana kendala hukum internasional yang melarang campur tangan dalam urusan negara berdaulat.

Selain itu, kesultanan Utsmaniyah menghadapi keterbatasan dalam memberikan bantuan kepada umat Islam di luar wilayahnya yang menjadi sasaran pemerintahan kolonial Eropah. Setelah rentang waktu 22 tahun di bawah rezim Tanzimat pimpinan Sultan Abdul Majid I, tampuk kepemimpinan beralih ke Sultan Abdul Aziz (1830-1876 M). Masa jabatan Sultan Abdul Aziz mencerminkan masa jabatan pendahulunya, yang ditandai dengan keterlibatan diplomatik yang luas dengan rekan-rekannya di Eropah dan penerapan reformasi yang cenderung berpihak pada model pemerintahan Barat.

Pada tanggal 31 Agustus 1876 M, Sultan Abdul Hamid II mengambil peran sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah, menggantikan Sultan Murad V (Nasution, 2013). Sultan Abdul Hamid II melakukan pendekatan tersendiri pada awal masa kekuasaannya, khususnya mengevaluasi dasar yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan seperti penggabungan cita-cita Barat ke dalam masyarakat Utsmaniyah. Berbeza dengan beberapa kalangan sezamannya yang ingin mengadopsi peradaban Barat secara menyeluruh, Sultan Abdul Hamid II menyimpan keraguan. Ia percaya bahwa dunia Timur memiliki peradaban yang kaya yang merupakan tandingan yang tangguh bagi Barat.

Dasar dari pemerintahan Sultan Abdul Hamid II yang menonjol adalah penolakannya yang gigih terhadap pengaruh Barat, terutama prinsip-prinsip demokrasi dan kerangka hukum yang ia anggap sebagai pengaruh asing yang infiltratif. Dasar Sultan Abdul Hamid II yang terbilang baru dalam bidang pendidikan mencakup reformasi pendidikan di mana sekolah-sekolah negeri ditempatkan di bawah pengawasannya secara langsung.

Ia memobilisasi lembaga-lembaga pendidikan untuk memupuk persatuan Islam dan berkolaborasi dengan sekte-sekte Sufi, mencari kesetiaan mereka kepada kekhalifahan Utsmaniyah. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mempromosikan Pan-Islamisme, sebuah gerakan yang menganjurkan solidaritas antar negara-negara Islam dan memposisikan Istanbul sebagai pusat penting pengaruh khilafah dan gerakan-gerakan sufi (Ali Muhammad, 2014).

Konsepsi Sultan Abdul Hamid II tentang Pan-Islamisme berasal dari keyakinan mendalam akan potensi Islam sebagai kekuatan pemersatu. Sultan Abdul Hamid II melihatnya sebagai alat politik untuk menjalin ikatan yang kuat di kalangan internal umat Islam untuk memupuk solidaritas dan pemberdayaan kolektif yang kuat. Visi ini secara aktif berupaya memanfaatkan posisinya sebagai penguasa kekhalifahan untuk menggalang dukungan dan persatuan di antara komunitas Muslim secara global.

Inti dari strategi Sultan Abdul Hamid II adalah pengakuan Islam sebagai kekuatan yang diperhitungkan secara politik dalam negeri. Ia percaya bahwa dengan menekankan persatuan Islam, ia dapat memperkuat integriti teritorial dan kohesi internal di dalam pemerintahan Utsmaniyah. Pandangan strategis ini merupakan perubahan dan berbeza dari kesultanan-kesultanan sebelumnya yang menunjukkan keterbukaan lebih besar terhadap pengaruh dan ideologi Barat. Perbedaan dari sikap sultan-sultan sebelumnya ini menggarisbawahi kompleksitas dan kedalaman pemikiran politiknya, sehingga memicu minat ilmiah untuk mengeksplorasi nuansa dan implikasi dasar Pan-Islamisme dalam kerangka pemerintahan Daulah Utsmaniyah (Nicho, 2021).

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, ditemukan perbedaan cara pandang Sultan Abdul Hamid II terhadap Eropah, khususnya dalam bidang politik. Salah satu aspek yang menonjol adalah penerapan Pan-Islamisme sebagai dasar utama kesultanan Utsmaniyah, yang menandai penyimpangan dari sultan-sultan periode sebelumnya yang menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap pengaruh Barat. Strategi yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II dalam merealisasikan dasar politik Pan-Islamismenya terhadap Daulah Utsmaniyah yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut dengan menganalisis seluk-beluk dasar Pan-Islamismenya di pemerintahan Utsmaniyah.

2. Metodologi Kajian

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metod kualitatif dengan menekankan pada studi kritis mengenai sejarah Daulah Utsmaniyah. Jenis kajian dengan menggunakan metode *library research* atau studi pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber atau literatur tertulis seperti buku, jurnal-jurnal, artikel dan thesis yang terkait dengan tajuk kajian. Selain itu, penulis menggunakan metod penyelidikan sejarah guna mengkaji mengenai sumber-sumber sejarah dengan langkah-langkah diantaranya: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pan-Islamisme dari segi etimologi merupakan perpaduan dua istilah berbeza, Pan, berasal dari bahasa Yunani yang bererti universaliti atau keseluruhan dan Islamisme yang berakar kata dari bahasa Arab (*al-islam, al-salam, al-silm*) bererti perdamaian, keamanan, ketaatan, dan kepatuhan kepada Islam.

Asal usul Pan-Islamisme sebagai sebuah istilah dapat ditelusuri kembali ke Gabriel Charms, seorang jurnalis Prancis terkemuka yang tulisannya banyak meliputi kekhalifahan Utsmaniyah dan signifikansinya. Charms, yang tertarik dengan peran kekhalifahan Utsmaniyah dan reaksi Muslim terhadap kolonialisme. Dalam wacana Eropah, Pan-Islamisme identik sebagai upaya yang menganjurkan persatuan umat Islam yang lebih luas dan perlawanan terhadap kolonialisme dan pengaruh eksternal, merangkum beragam aspirasi umat Islam akan

persatuan, identitas, dan perlawanan terhadap tekanan eksternal, sebuah konsep yang terus bergema dalam diskusi mengenai sejarah Islam, identitas Muslim global dan dinamika geopolitik.

Konsep Pan-Islamisme dalam konteks perspektif Muslim Turki, mengungkapkan pendekatan multifase untuk memupuk persatuan dan solidaritas di dunia Islam di bawah kepemimpinan khilafah Utsmaniyah. Visi persatuan Islam ini, yang dikenal sebagai *Ittihat-i Islam* atau *Birligi Islam* di kalangan sarjana Turki, memiliki akar sejarah yang dalam dan implikasi ideologis yang bergema selama berkurun-kurun. *Ittihat-i Islam*, yang berarti persatuan Islam, muncul sebagai inisiatif strategis di dalam kekhilafahan Utsmaniyah untuk mengkonsolidasikan komunitas Muslim secara global di bawah kerangka kepemimpinan yang kohesif. Pan-Islamisme dipandang sebagai gagasan politik, terkait erat dengan upaya menjaga wilayah Utsmaniyah dari gangguan sekularisme dan pengaruh eksternal (Lukman, 2021).

Sarjana seperti Bruce Master dan Gabor Agoston menyoroti Pan-Islamisme bukan sekadar sebuah idea, melainkan sebuah gerakan dan dasar komprehensif yang bertujuan untuk menggalang umat Islam, baik di dalam maupun di luar kekuasaan Utsmaniyah, untuk bersatu di bawah payung kekhilafahan Utsmaniyah. Gerakan ini berkembang sebagai respon terhadap kolonialisme Eropah yang mengancam kedaulatan dan otonomi umat Islam di berbagai wilayah di luar kesultanan Utsmaniyah (Abdul Somad, 2015).

Tujuan dari dasar politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II tentu akan tercapai dengan strategi atau penyebaran gagasan yang dapat disampaikan dengan baik terhadap umat Islam. Dengan tujuan untuk membuat kejayaan Islam berdiri kembali serta mengembalikan keutuhan Daulah Utsmaniyah seperti sebelumnya, di antaranya strategi-strategi yang diusung oleh Sultan Hamid II ialah Strategi propaganda melalui media massa, strategi penyebaran Pan-Islamisme melalui pengiriman konsuler, pembangunan sistem transportasi, kempen memajukan pendidikan serta membuat strategi untuk memajukan ekonomi.

3.1. Strategi Propaganda Melalui Mass Media

Dampak atau akibat dari adanya kontak hubungan antara umat Islam dengan Eropah, selain dampak negatif juga memberikan dampak positif bagi umat Islam, salah satunya mengalami kemajuan dalam bidang teknologi dan intelektual. Interaksi yang sering terjadi di antara umat Islam dengan orang-orang Barat berdampak pada peningkatan pers atau media informasi milik umat Islam. Media informasi atau pers merupakan salah satu sarana dalam dakwah Islam sekaaligus strategi penyebaran Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II sejak awal pemerintahannya (Ahmad Salman & Nurfitri, 2022).

Penyebaran cita-cita Pan-Islamisme mendapatkan momentumnya melalui pers, yang berfungsi sebagai platform untuk menyatukan umat Islam dan melawan kepentingan kekuatan imperialis. Di masa Kesultanan Utsmaniyah, perkembangan surat kabar dan majalah meluas. Pada tahun 1876 M, jumlah publikasi cetak melonjak menjadi 107, menandai peningkatan signifikan dalam penyebaran informasi.

Tahun-tahun berikutnya menyaksikan pertumbuhan eksponensial, dengan angka sirkulasi berkisar antara 200 hingga 500 eksemplar pada tahun 1900 M dan lonjakan yang luar biasa hingga 1000 surat khabar dan majalah yang beredar pada tahun 1914 M. Perkembangan media cetak ini tidak hanya memperluas akses terhadap informasi namun juga mengkatalisasi gerakan sosial dan politik, membentuk wacana publik dan mempengaruhi lanskap dasar. Peran media pers sebagai katalisator transformasi masyarakat dan mobilisasi politik menegaskan pentingnya peran media sebagai landasan sistem komunikasi modern (Ahmad Salman & Nurfitri, 2022).

Propaganda media Utsmaniyah yang semakin tersebar luas ke penjuru negeri dengan menyebarkan Pan-Islamisme sebagai pemikiran Islam, menimbulkan ketakutan oleh para tokoh Barat dan orang-orang Kristen yang berada dalam naungan Daulah Utsmaniyah akan kebangkitan Islam. Pan-Islamisme yang marak di perbincangkan di media menimbulkan berbagai respon dari masyarakat Utsmaniyah sendiri bahkan di kalangan Eropah dan Barat. Pada tahun 1878 M terbit surat kabar yang ditulis oleh Arminius Vamber dengan tulisannya bahwa semakin hari populasi Muslim di India semakin pesat dan tidak mungkin jika hal ini tidak terjadi di masa depan. Dalam tulisannya, Arminius Vamber menjelaskan bahwa akan sangat di sayangkan jika orang-orang Barat atau Kristen diam saja tanpa melakukan sesuatu (Lee, 1942).

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M), surat khabar *Besiret* menjadi semakin penting sebagai corong dasar Pan-Islamisme. Sultan Abdul Hamid II, yang dikenal kerana pembelaannya terhadap Pan-Islamisme. Di dalam surat kabar *Besiret* memberitakan mengenai Perang Aceh dengan perspektif Pan-Islamisme. Artinya, Surat kabar *Besiret* memperlihatkan bahwa Aceh merupakan negara Muslim yang berada di bawah perlindungan Daulah Utsmaniyah. Pada tanggal 27 Mei 1873 M di dalam surat kabar *Besiret* di kabarkan bahwa masyarakat Aceh merupakan warga negara Utsmaniyah, buktinya adalah dengan bendera Kesultanan Aceh yang berlambang Bulan Bintang.

Surat khabar *Besiret* bertujuan untuk memberikan informasi kepada sultan-sultan Utsmaniyah agar

memberikan bantuan militer maupun diplomasi untuk membantu Aceh dalam mengatasi serangan Belanda. Negara Utsmaniyah menjadi hal yang penting kerana pada saat itu merupakan negara Muslim terbesar di dunia, dan Sultan Abdul Hamid juga di gelari sebagai Pemimpin Muslim (*Amirul Mukminin*) dengan dasar Pan-Islamisme-nya.

Surat kabar *Besiret* merupakan salah satu respon Utsmaniyah terhadap imperialisme yang terjadi di wilayah-wilayah Muslim, seperti Hindia Belanda, India hingga British. Salah satunya yang mengabarkan mengenai Perang Aceh secara spesifik iaitu surat kabar *Besiret*. Salah satu surat kabar yang lain yang juga berisi mengenai Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ialah surat khabar Utsmaniyah *Siratimustakim Sebilurresad*, penulisan majalah ini dipimpin oleh Mehmed Akif Eksoy yang di terbitkan di Istanbul pada tahun 1913-1914 M dan terdapat 11 jilid. *Siratimustakim Sebilurresad*.

Dalam surat khabar Utsmaniyah *Siratimustakim Sebilurresad* untuk periode September 1913-Maret 2014 jilid ke-11 disebutkan bahwa kebangkitan umat Islam melawan penjajah telah dimulai dari madrasah-madrasah yang dikelola komunitas Jawa dan Arab yang untuk di Batavia telah memiliki 4 Madrasah, dan masing-masingnya memiliki 80 santri. Disini disebutkan pula bahwa Surabaya, Solo (Surakarta) dan Batavia dengan sarakat Islamnya dan tertulis bahwa pulau Jawa telah berubah benua Utsmaniyah kerana bendera Utsmaniyah dikibarkan di semua cabang perusahaan ini.

3.2. Strategi Penyebaran Pan Islamism Melalui Pengiriman Konsuler

Sultan Abdul Hamid II menyedari perlunya memperkuat prinsip-prinsip Islam di dalam Daulah Utsmaniyah dengan orang-orang terpercaya di Istana Yildiz. Inti dari upaya ini adalah misi diplomatik yang ditargetkan yang dikirim ke wilayah-wilayah yang dianggap rentan terhadap pengaruh gagasan Barat. Para petugas konsuler ini, yang bertindak di bawah arahan Sultan Abdul Hamid II, memulai kunjungan strategis untuk memperkuat struktur Islamisme Utsmaniyah di seluruh dunia Islam. Di antara tokoh-tokoh penting yang dipercayakan dengan misi penting ini ialah:

1. Syekh Muhammad Zafir Pasha, Berasal dari Libya dan berafiliasi dengan tarekat Syaziliyyah-Madaniyyah, mengambil peranan penting dalam memajukan propaganda Pan-Islamisme di Afrika Utara dan Mesir
2. Sayyid Fadl Al-Alawi Al-Husaini Pasha, Seorang tokoh dari Tarim, Hadramaut. Mempelopori upaya untuk memperkuat Pan-Islamisme dari wilayah Yaman hingga Asia Tenggara, memanfaatkan koneksi dan kredibilitasnya dalam komuniti Islam.
3. Syekh Ahmad As'ad Pasha, Seorang ulama terkemuka dan pedagang kaya yang tinggal di Hijaz, mengemban tanggung jawab untuk memperkuat sentimen Pan-Islamis di wilayah Hijaz dan di antara suku-suku Arab di Yaman.
4. Syekh Abu Al-Huda Al-Sayyadi Pasha, Berasal dari Aleppo, Syria, Syekh Abu Al-Huda Al-Sayyadi Pasha, pemimpin tarekat Rifa'iyyah, dipercaya untuk memperluas Pan-Islamisme di wilayah Syam, Irak, dan wilayah tertentu di Hijaz (Nicho, 2021).

Keempat utusan Sultan Abdul Hamid II ini dikirim ke wilayah tugasnya masing-masing. Penempatan kantor konsulat yang strategis tidak hanya terbatas di Eropah saja tetapi meluas ke wilayah-wilayah yang memiliki kepentingan strategis. Sultan Abdul Hamid II mengirim utusan yang terdiri dari para ulama, para sufi, pedagang, dan orang-orang penting lainnya ke berbagai wilayah yang dengan populasi masyarakat Muslim yang ada di wilayah Asia, Timur tengah, bahkan Afrika, dengan tujuan untuk menjalin rasa emosional umat Islam yang ada di wilayah-wilayah tersebut dengan Khilafah (Siti Rohmah & Frial Ramadhan, 2022).

Sebagai bentuk dari strategi dasar politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II, tugas para konsulat yang dikirim oleh Sultan Abdul Hamid II lebih dari sekedar mengurus warga negaranya yang ada di negeri orang. Sesuai dengan pernyataan yang ada di *Ikdam* (surat kabar yang diterbitkan di Istanbul) bahwa tugas paling penting dari para konsulat Utsmaniyah ialah memperkuat ikatan diantara orang-orang Islam dimanapun mereka berada, para konsuler tersebut haruslah merupakan orang yang beragama, sebab agama merupakan cara yang esensial untuk memperluas pengaruh Daulah Utsmaniyah di negeri-negeri dengan populasi Muslim (Nicho, 2021).

Hal ini tentu akan menjadi hal yang akan sangat ditakuti oleh kaum Kolonialis Eropah, sebagaimana perkataan Isaac van de Putte, seorang menteri urusan jajahan Belanda yang mengatakan 'Para konsulat Daulah Utsmaniyah dapat membangkitkan fanatism yang penuh dendam dan mudah terbakar di kalangan Muslim Asia Tenggara'(Nicho, 2021).

3.3. Pembangunan Sistem Transportasi

Pembangunan jalur keretapi di wilayah Hijaz merupakan aspek penting dari visi strategis Sultan Abdul Hamid II yang bertujuan mewujudkan agenda politik Pan-Islamisme. Dimulai pada bulan Mei 1900 M, proyek kereta api Damaskus ke Madinah mempunyai dampak yang signifikan. Hal ini bertujuan untuk menggantikan perjalanan darat yang sulit, yang biasanya memakan waktu sekitar 40 hari, dengan waktu perjalanan yang jauh lebih cepat, yaitu hanya 12 hari. Transformasi transportasi ini tidak hanya memfasilitasi ibadah haji bagi umat Islam taat yang melakukan perjalanan ke Baitullah, Mekah, dan Madinah, tetapi juga menyulut semangat keagamaan yang kuat di antara mereka (Rizka, 2017).

Selain itu, jalur kereta api mempunyai banyak tujuan, memperluas jangkauannya lebih dari sekedar efisiensi logistik. Pembangunannya memupuk hubungan nyata antara wilayah-wilayah yang berjauhan di wilayah Kesultanan Utsmaniyah, sehingga meningkatkan pengawasan administratif dan keamanan di wilayah tersebut. Wilayah ini bertindak sebagai benteng strategis melawan potensi pemberontakan, dan memberikan cara untuk dengan cepat memperkuat otoritas Utsmaniyah di seluruh wilayahnya. Pesatnya perluasan infrastruktur perkeretaapian juga memainkan peran penting dalam konsolidasi dan proyeksi kekuatan Utsmaniyah di seluruh wilayah pedalaman, yang menggarisbawahi pentingnya hal tersebut dalam memajukan cita-cita Pan-Islamisme.

Sultan Abdul Hamid II memprakarsai proyek ini dengan menyumbangkan sumber daya pribadi dan negara dalam jumlah besar, seperti sumbangannya sebesar 50.000 koin emas dari kasnya sendiri dan tambahan 100.000 koin emas dari perbendaharaan Negara Utsmaniyah (Zulhelman & Ermy, 2017). Pendanaan untuk proyek ini tidak hanya terbatas pada kas negara, namun juga didukung oleh kontribusi umat Islam di berbagai wilayah geografis. Individu dan entitas, seperti penguasa Mesir Ahmad Pasha Al-Masynawi dan media terkemuka seperti surat kabar 'Al-Liwa' dan Al-Muayyid di Mesir, memberikan contoh dukungan yang lebih luas ini dengan menyumbangkan 3.000 Lira Utsmaniyah untuk pengembangan jalur kereta api. Dukungan finansial dan moral yang luas ini menggarisbawahi komitmen global di kalangan umat Islam untuk berpartisipasi aktif dan memperjuangkan keberhasilan inisiatif perkeretaapian transformatif ini.

Penyelesaian jalur kereta api ke Madinah pada bulan Agustus 1908 M menandai tonggak sejarah transportasi. Namun, rencana untuk memperluas jalur ke Mekah mendapat tentangan dari Husain Ibn Ali, penguasa Mekah, kerana masalah politik. Meski begitu, perjalanan kereta api perdana dari Damaskus ke Madinah pada 22 Agustus 1908 M, menempuh jarak 814 mil hanya dalam tempoh 3 hari, melambangkan terwujudnya impian lama umat Islam secara global, iaitu mempermudah akses menunaikan ibadah haji.

3.4. Kempen Memajukan Pendidikan

Kempen Sultan Abdul Hamid II untuk membentuk kembali pendidikan berasal dari respons strategis terhadap pelanggaran ideologi Barat dan sentimen nasionalis dalam sistem pendidikan Utsmaniyah. Menyedari pengaruh arus ini dan potensinya untuk melemahkan nilai-nilai Islam, Sultan melakukan intervensi tegas untuk menyelaraskan kembali prioriti pendidikan menuju kerangka yang berakar pada studi Islam.

Dorongan untuk perubahan ini dapat ditelusuri kembali ke peristiwa-peristiwa penting seperti perang melawan Italia, yang mengungkapkan adanya tekanan eksternal yang bertujuan untuk menundukkan Negara Utsmaniyah, termasuk melalui upaya kolonisasi pendidikan. Inisiatif Italia untuk mendirikan sekolah dan lembaga sosial di wilayah Utsmaniyah menggarisbawahi konflik budaya dan ideologi yang lebih luas yang sedang terjadi.

Untuk menjaga terhadap infiltrasi ide-ide nasionalis dan Barat-sentris, Diantara beberapa dasar yang diterapkan Sultan Abdul Hamid II di bidang pendidikan yakni:

1. Memisahkan materi-materi yang digunakan sebagai sarana mengajarkan nasionalisme bangsa-bangsa lain dari kurikulum pelajaran yang akan memberikan pengaruh yang negative bagi para pelajar Muslim, seperti materi sejarah umum dan sastra.
2. Menjadikan materi fiqih, akhlak, dan tafsir sebagai materi utama dalam kurikulum pelajaran
3. Pada pembelajaran sejarah, hanya membatasi pada pembelajaran sejarah Islam saja, termasuk sejarah mengenai Daulah Usmaniyah sendiri (Luqman, 2020).

Reformasi pendidikan ini tidak hanya bersifat teori tetapi diterapkan secara ketat di seluruh sekolah di bawah lingkup Sultan Abdul Hamid II. Inti dari reformasi Pendidikan ini ialah memprioritaskan Al-Qur'an

sebagai materi kurikulum mendasar, yang mencerminkan komitmennya untuk menanamkan nilai-nilai Islam sebagai inti pendidikan Sultan Abdul Hamid II juga melakukan infrastruktur besar-besaran dan perluasan kelembagaan di berbagai wilayah. Di Istanbul, ia memelopori pendirian 355 sekolah dasar negeri dan 7 sekolah dasar swasta, menandai lompatan signifikan dalam aksesibilitas pendidikan di ibu kota kekaisaran.

Perkembangan pendidikan yang pesat ini bergema di seluruh Anatolia, di mana jaringan sekolah berkembang di bawah naungan Sultan Abdul Hamid II. Sekilas tentang warisan pendidikannya mengungkapkan betapa besar pengaruhnya: di Aydin, 1.379 sekolah didirikan; di Kastamonu muncul 885 sekolah dasar dan 56 sekolah negeri, ditambah 1.406 sekolah swasta; dan di Canakkale, infrastruktur pendidikan yang kuat yang terdiri dari 400 sekolah dasar telah terbentuk. Selain itu, kota-kota besar seperti Ankara, Konya, Diyarbakir, Sivas, Izmit, dan Erzurum mengalami lonjakan jumlah institusi pendidikan, masing-masing memiliki lebih dari 200 sekolah dasar, dan Erzurum sendiri menampung lebih dari 100 sekolah serupa. Jejak pendidikan Sultan Abdul Hamid II bahkan meluas ke wilayah seperti Kosovo dan Manatsir di Balkan, tempat sekolah dasar berkembang biak sebagai bagian dari reformasi pendidikannya (Mukarom, 2015).

Selain pendidikan dasar, visi Sultan Abdul Hamid II mencakup institusi pendidikan tinggi, yang mengarah pada pendirian universitas dan perguruan tinggi bergengsi. Universitas Istanbul berdiri sebagai mercusuar dari visi ini, yang didirikan antara tahun 1878 dan 1900 M, berfungsi sebagai pusat bagi mahasiswa dari negara-negara Arab yang belajar di Istanbul. Pendirian perguruan tinggi khusus seperti Fakultas Hukum, Fakultas Kewangan, Fakultas Seni, Fakultas Teknik, Fakultas Niaga, Fakultas Kepolisian, Fakultas Kedokteran Hewan, dan lain-lain menggarisbawahi komitmen Sultan dalam menyediakan jalur pendidikan yang beragam dan profesional.

Tujuan strategik di balik inisiatif pendidikan ini bukan hanya untuk menyebarkan pengetahuan tetapi juga untuk menumbuhkan rasa keingintahuan intelektual, tanggung jawab sipil, dan kesetiaan kepada Khilafah di kalangan siswa. Warisan Sultan Abdul Hamid II di bidang pendidikan tetap menjadi bukti pandangan ke depan, dedikasinya, dan pengaruhnya yang kuruni dalam membentuk lanskap intelektual Kesultanan Utsmaniyah dan sekitarnya.

Ketentuan pendidikan bagi pelajar Arab yang belajar di Istanbul di bawah naungan Sultan Abdul Hamid II tidak hanya komprehensif tetapi juga menyoroti komitmen Sultan untuk membina generasi yang menguasai prinsip-prinsip Islam dan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Ketentuan-ketentuan ini melampaui kurikulum akademis dan mencakup dukungan praktis, seperti liburan yang diberikan kepada siswa selama studi lima tahun mereka, dan pemerintah menanggung biaya kepulangan mereka.

3.5. Strategi Memajukan Ekonomi

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Kesultanan Utsmaniyah menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan yang ditandai dengan defisit pembayaran hutang. Kerentanan finansial ini menarik tindakan oportunistik dari Rusia, yang memulai konflik dengan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1877. Periode ini ditandai dengan kemerosotan ekonomi Kesultanan Utsmaniyah, sehingga tidak siap mempertahankan wilayahnya. Perjanjian San Stefano yang dihasilkan membuat Kekaisaran Utsmaniyah menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia, sehingga memperburuk kekhawatiran negara-negara Eropah mengenai potensi konflik yang lebih luas.

Kesultanan Utsmaniyah memulai serangkaian reformasi dan inisiatif ekonomi signifikan yang bertujuan mengelola hutang dan memodernisasi lembaga kewangannya pada akhir kurun ke-19. Menghadapi hutang yang semakin besar, pemerintahan Utsmaniyah melakukan negosiasi dengan kreditor dan badan kewangan internasional, seperti Bank of England (BIO), untuk mendapatkan pinjaman dalam dan luar negeri.

Dalam perundingan tersebut, dicapai kesepakatan penting dimana pemerintah Utsmaniyah berkomitmen untuk menyerahkan kendali atas sumber pendapatan tertentu, termasuk bea cukai, perikanan, sutra, garam, tembakau, dan pajak lainnya, untuk dikelola oleh kreditor dan BIO. Alternatifnya, pemerintah akan mengalokasikan seperlima dari pajak tersebut untuk pembayaran hutang. Pengaturan ini, meskipun pada awalnya ditanggapi dengan skeptis, namun terbukti efektif dalam mengurangi beban hutang yang sangat besar. Melalui pengelolaan fiskal yang cermat dan dasar ekonomi yang hati-hati, hutang dalam negeri berkurang secara signifikan dari tiga ratus juta Lira yang mengkhawatirkan menjadi tiga puluh juta Lira yang dapat dikelola dalam waktu yang relatif singkat.

Berdasarkan keberhasilan ini, pemerintah Utsmaniyah memulai diskusi lebih lanjut dengan kreditor pada tahun 1880 untuk menetapkan pendekatan terstruktur terhadap pembayaran hutang. Negosiasi ini membuka jalan bagi keputusan dasar penting oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1881. Di bawah kepemimpinannya,

Dekret Muharram diratifikasi, meresmikan pembentukan Administrasi hutang Publik Utsmaniyah (OPDA). Lembaga ini, diawasi oleh konsorsium investor perbankan Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Austria, Italia, dan Utsmaniyah, memainkan peran penting dalam mengelola dan membayar kewajiban hutang luar negeri Kesultanan Utsmaniyah.

Selain itu, menyadari pentingnya pembangunan pertanian dan inklusivitas kewangan, pemerintah Utsmaniyah mengambil langkah perintis dengan mendirikan *Ziraat Bank* (Bank Pertanian Turki) pada tahun 1888. berbeza dengan lembaga kewangan sebelumnya yang sangat bergantung pada intervensi asing, Ziraat Bank didirikan secara independen untuk menyediakan dana, kredit dan modal yang dapat diakses oleh petani di seluruh kekaisaran. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, memberdayakan masyarakat pedesaan, dan memperkuat sektor pertanian, yang penting bagi stabilitas ekonomi kekaisaran.

Dampak Bank Ziraat tidak hanya mencakup kewangan pedesaan. Khususnya, selama proyek pembangunan kereta api ambisius yang menghubungkan Istanbul ke Mekah pada tahun 1890-an, Sultan Abdul Hamid II memanfaatkan sumber daya Bank Ziraat. Dengan alokasi strategis sebesar 100.000 Lira Utsmaniyah dari dana bank, Sultan memfasilitasi pembangunan jalur transportasi penting ini, yang menunjukkan peran bank sebagai katalis bagi pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi.

Inisiatif-inisiatif ini secara kolektif mencerminkan period transformatif dalam sejarah ekonomi Utsmaniyah, yang ditandai dengan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi tantangan hutang, meningkatkan infrastruktur kewangan, meningkatkan kesejahteraan pertanian, dan mendorong investasi strategis di sektor-sektor penting seperti transportasi. Pembentukan institusi seperti OPDA dan Bank Ziraat merupakan contoh perpaduan inovasi dalam negeri dan kerja sama internasional yang menandai jalan Kesultanan Utsmaniyah menuju ketahanan ekonomi dan modernisasi pada akhir kurun ke-19 (Anwar & A Toto, 2023).

Dekret Muharram menandai momen penting dalam lanskap ekonomi dan politik Kesultanan Utsmaniyah, khususnya mengenai peran Administrasi Hutang Umum Utsmaniyah (OPDA) di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Keputusan tersebut menguraikan tanggung jawab OPDA, menekankan wewenang langsungnya dalam administrasi kewangan, perolehan pinjaman, dan pembayaran hutang, semuanya berada di bawah wewenang penuh Sultan. Salah satu mandat penting OPDA adalah monopoli tembakau di wilayah Turki Utsmaniyah. Monopoli ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk menghasilkan pendapatan yang penting untuk pengurangan hutang, dan kedua, untuk menegaskan kendali atas sektor menguntungkan yang didominasi oleh imigran Muslim Yunani di Mesir. Para imigran ini merupakan angkatan kerja yang signifikan di pabrik-pabrik rokok, sehingga menyoroti dinamika ekonomi dan sosial pada saat itu (Luqman, 2020).

Di luar tujuan ekonominya, pendirian OPDA juga bersinggungan dengan agenda Pan-Islamis Sultan Abdul Hamid II. Ideologi politik ini bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat dunia Islam di bawah Kekhalifahan Utsmani. Keterlibatan OPDA dalam proyek-proyek infrastruktur penting, seperti administrasi perkeretaapian, tidak hanya mengurangi risiko tetapi juga selaras dengan tujuan yang lebih luas yaitu meningkatkan pengaruh Pan-Islamisme dan mengamankan kepentingan strategis.

4. Kesimpulan

Dasar politik Pan-Islamisme Dinasti Turki Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M) merupakan sebuah usaha yang dilakukan Sultan Abdul Hamid II untuk mengatasi berbagai permasalahan negara yang tengah mendera dengan cara mengkampanyekan persatuan umat Islam di dalam satu kekuasaan kekhalifahan. Diantara Strategi dasar politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid yang digunakan dalam merealisasikan dasar Pan-Islamisme ialah: 1.) Strategi propaganda media massa 2.) Strategi penyebaran Pan-Islamisme melalui pengiriman konsuler ke berbagai wilayah-wilayah Muslim yang memang memerlukan perhatian lebih dengan kondisi yang rawan oleh penyebaran pemikiran Barat. 3.) Pembangunan sistem transportasi 4.) Kempen memajukan pendidikan dan 5.) Strategi memajukan ekonomi dengan mendirikan institusi *Utsmani Public Debt Administration* (OPDA).

Penghargaan

Penulis artikel ingin mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan kepada Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atas peluang yang bermakna untuk penerbitan artikel ini.

Rujukan

- Abdul Somad (2015) Pemikiran Dan Pergerakan Pan-Islamisme Di Indonesia Pada Awal kurun Ke-20 Jurnal Pendidikan Dan Sejarah, *Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 1 (1)
- Ahmad Salman Kurniawan, Nurfitri Hadi (2022) Pengaruh Pan Islamisme Bagi Kekhalifahan Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II, *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 2 (2), 190.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi. 2014. *Sejarah Daulah Utsmaniyah, Faktor-Faktor Kebangkitan Dan Sebab Sebab Keruntuhannya*. Jakarta:Ummul Qura, 744-751.
- Andrew Peacock. 2015. *From Anatolia to Aceh*. Oxford University Press.
- Anwar Firdaus Mutawally, A Toto Suryana Afriatin, dkk (2023) Kemunculan Perbankan Modern dan Peranannya dalam Perekonomian Menjelang Keruntuhan Turki Utsmani (1847-1923), *Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 4(1), 25.
- Dedi Supriyadi. 2016. *Sejarah Peradaban Islam*. Pustaka Setia, 248.
- Halil Inalcik. 1995. *The Utsmani Empire: The Clossical Age 1300-1600*: London. Phoenix, 6.
- Lee, D. E. 1942. *The Origins Of Pan-Islamisme. The American Historical Review*. Oxford: Oxford University Press, 278-287.
- Luqman Al-Hakim. 2020. Sejarah Jaringan sekularism Dalam Tubuh Kekhalifahan Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II". *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 128.
- Luqman Al-Hakim, Muhammad Faiz (2021) The Role of The Turkey Sekularization Movement in The Collapse of The Utsmani Empire, *Jurnal Tasfiyah Pemikiran Islam*, 5 (1).
- Masudul Hasan, *History of Islam Vol II* (Delhi: Adam Publisher and Distributer, 1995), 572.
- Muhammad Nicho Pandawa Trisakti. 2020. *Pasang Dan Surut Pengaruh Pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah Terhadap Hindia Belanda 1882-1928*. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mukarom (2015) Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Utsmani 1300-1922 M, *Jurnal Tarbiya*, 1 (1), 117.
- Nicho Pandawa. 2021. *Khilafah Dan Ketakutan Penjajah Belanda*. Bogor: Komunitas Literasi Islam, 159.
- Rizka Kusuma Rahmawati (2017) Studi Historis dasar Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah Utsmaniyah (1876-1909 M), *Jurnal Juspi*, 1 (1), 207.
- Siti Rohmah Soekarba, Frial Ramadhan Supratman (2022) From Abdul Hamid II until Erdogan: Pan-Islamisme Movement in Indonesia and Turkey, *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 9 (1)
- Syamruddin Nasution. 2013. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau, 148.
- Taqi al-Din al-Nahbani. 2002. *Al-Dawlah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Ummah, 148.
- Zulhelman Roslan & Ermy Azziaty Rozali. 2017. Polisi Pan-Islamisme semasa Pemerintahan Sultan Abd al-Hamid II (1876-1909M), *Jurnal Islamiyyat* 39 (1), 79.